

403

PROGRAM INDUSTRIALISASI DA- LAM RANGKA PEMBANGUNAN NA- SIONAL DAN BEBERAPA ASPEK PER- DAGANGAN/PEMBIAYAAN*

J. PANGLAYKIM

PENGANTAR

Dari indikator-indikator ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan (9,6% dalam tahun 1980), penekanan inflasi (di bawah 10% dalam tahun 1981), kenaikan jumlah devisa, keseimbangan anggaran, *credit standing* yang cukup tinggi di pasar modal dan uang internasional, stabilitas politik, manajemen, dan ekonomi nasional, dan lain-lain terlihat bahwa perekonomian nasional Indonesia, secara makro, tumbuh dan maju dengan mantap. Kekuatan dan *asset* yang telah dicapai di tingkat makro itu dapat berlangsung lebih mantap dan kontinyu lagi bila kekuatan tersebut diterjemahkan ke dalam asset nasional. Dalam istilah bisnis, usaha dan industri nasional harus dapat mengambil kesempatan yang baik ini untuk kemajuan dan kepentingan perekonomian nasional. Kesempatan itu merupakan pendorong dan perangsang positif bagi setiap usaha di Indonesia. Proyek-proyek yang *feasible* dapat dilaksanakan karena bisnis internasional sedang mencari penempatan dana-dananya. Di dalam praktek, ini berarti bahwa kekuatan makro dapat diterjemahkan ke dalam asset nasional atau dapat dijadikan kesatuan-kesatuan produksi nasional yang akan memperlebar dan memperdalam struktur industri Indonesia.

Dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, sektor-sektor industri dan usaha nasional (perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah) kini sudah memperlihatkan kapabilitas dan kapasitasnya bukan saja dalam hal pengumpulan modal dan aksesnya ke sumber-sumber, tetapi juga dalam hal manajemen dan organisasional dan aksesnya ke teknologi ini dicapai berkat adanya kekuatan makro tersebut. Ini berarti pula bahwa para wiraswasta kita, baik swasta dan pemerintah, sudah mampu memereteli perjanjian-perjanjian dalam bentuk paket; mereka tidak lagi harus menerima begitu saja prinsip-

*Background paper disampaikan sebagai bahan diskusi pada seminar "Industrialisasi Dalam Rencana Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta, pada tanggal 10-12

prinsip perjanjian paket (*package deal*) yang diajukan oleh MNC-MNC manapun. Dengan akses ke pasar mereka dapat melaksanakan proyek-proyek yang *feasible (self liquidating project)*; ini pada gilirannya akan memberikan rasa percaya diri yang semakin besar baik kepada para wiraswasta dan industriawan kita tetapi juga kepada bisnis internasional.

Tetapi dalam proses tersebut, tidak semua sektor usaha nasional mampu mencapai tingkat kapabilitas dan kapasitas itu. Di antara mereka ada pula yang memperlihatkan "wajah-wajah" dan "peri laku" yang kurang dapat diterima oleh mereka yang mendasarkan "tata main"-nya pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Namun kita dapat menarik kesimpulan bahwa banyak sektor baik swasta maupun pemerintah yang sudah memperlihatkan kebolehannya dalam pengambilan kesempatan di berbagai sektor kegiatan bisnis, industri, dan jasa. Tetapi kebolehan mereka itu masih harus dipupuk dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat yang mengarahkan mereka ke strukturisasi dan *pooling* kekuatan.

ASUMSI: PROGRAM INDUSTRIALISASI TERINTEGRASI ANTAR BERBAGAI SEKTOR INDUSTRI UNTUK MEMPERDALAM STRUKTUR INDUSTRI

Dewasa ini, suatu program baru yang lebih terintegrasi sedang dipelajari yang tujuannya mengalihkan industri yang masih bersifat substitusi dan melebar. Keadaan tersebut dianggap telah mengakibatkan sektor industri dan ekonomi nasional menjadi lebih bergantung kepada bahan-bahan industri dari luar negeri (impor). Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian berkesimpulan bahwa kita harus meninggalkan tingkat perakitan (*assembling*) dan menuju ke arah penciptaan kaitan hilir dan hulu (*forward and backward linkages*), kaitan yang lebih konsisten antar industri-industri untuk menciptakan industri dasar yang menghasilkan bahan-bahan mentah industri dan menghilangkan apa yang disebut *industri alisasi in de breedte*.

Makalah ini membatasi diri pada pembahasan mengenai fungsi bisnis yang mendukung kelancaran program industrialisasi dan penciptaan sarana yang lebih lengkap. Termasuk dalam fungsi bisnis itu ialah keputusan di tingkat tertinggi (*political dan economical will*), dukungan dan kesediaan yang berwenang di bidang-bidang tersebut untuk mengadakan perubahan struktural.

Bagaimanakah struktur dan fungsinya dewasa ini? Apa yang harus diubah dan bagaimana caranya? Apakah harus melalui peraturan-peraturan, atau

sederhana yakni mekanisme ekonomi dan bisnis? Dalam hubungan ini, di samping syarat-syarat, seperti tenaga kerja yang masih membutuhkan latihan, peningkatan ketrampilan para konsultan (teknis, manajemen, dan lain-lain), riset dan perkembangan (R & D), pengangkutan, asuransi, termasuk *risk assesment*, *adjustters*, terdapat dua kegiatan pokok lainnya yakni perdagangan dan keuangan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang sedang berada dalam proses perubahan, dan lembaga-lembaga lain yang mungkin masih dibutuhkan, keahlian yang dibutuhkan dalam proses tersebut, teknik-teknik, alat-alat, diperbolehkannya usaha-usaha pengelompokan vertikal dan horisontal (dalam hal ini, terdapat perbedaan struktur kalkulasi produksi, misalnya antara Jepang dan Amerika Serikat, yakni US\$ 1.400 lebih rendah untuk Toyota) dan lain-lain. Kita akan memusatkan pembicaraan pada aspek perdagangan dan hanya akan menyinggung aspek keuangan yang mempunyai hubungan dengan aspek perdagangan tadi.

PROGRAM INDUSTRIALISASI TERINTEGRASI DAN DAMPAK-DAMPAKNYA DI BIDANG-BIDANG LAIN

Bila kita merumuskan program industrialisasi terintegrasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang ditentukan oleh yang berwenang, maka kita dapat memperkirakan akan timbul berbagai pengaruh di bidang-bidang lain, misalnya:

1. Berbagai kelompok dan golongan akan mengadakan studi pra-feasibility dan dilanjutkan oleh studi feasibility yang lebih terperinci dan terarah bagi pelaksanaan ratusan proyek industri terintegrasi.
2. Pelaksanaan proyek-proyek tersebut, dari *upstream* sampai *downstream*, akan membutuhkan, dalam jumlah besar, modal ekuiti, modal investasi mesin-mesin, pendirian gedung-gedung, modal kerja (termasuk penyediaan bahan-bahan), dan modal untuk kelancaran penjualan ke konsumen nasional dan internasional.
3. Jumlah modal itu bukan saja untuk jangka panjang dan menengah, tetapi juga untuk jangka pendek. Ini berarti bahwa perubahan yang diakibatkan oleh industri yang terintegrasi akan mengharuskan industri perbankan nasional dan lembaga-lembaga keuangan lainnya memikirkan cara penampungan dan pemberian jasa-jasa seperti jumlah modal yang besar, kredit-kredit dalam berbagai bentuk dan variasi; perbankan dan lembaga keuangan harus dapat melayani proyek-proyek ini dan juga proses produksi, seperti penyediaan bahan-bahan mentah, dan proses penvampaian produk

4. Proses produksi harus disertai oleh proses penyampaiannya ke tangan konsumen. Proses penyampaian ini berbeda dari proses penyampaian hasil-hasil pertanian (tidak diproses), misalnya dalam hal pemasaran dan lembaga-lembaga keuangannya. (Dalam hal ini, lembaga-lembaga keuangan mungkin harus mengadakan rekonstruksi, reorganisasi, atau penggabungan lembaga-lembaga keuangan yang giat di bidang penyampaian produk ke konsumen secara sukarela untuk kepentingan bersama.)
5. Penyediaan jasa-jasa, seperti pengapalan, asuransi, konsultasi, dan lain-lain. Jasa-jasa tersebut merupakan komponen penting pelengkap dalam usaha ke arah menyukseskan program industrialisasi yang terintegrasi.
6. Logistik nasional; bidang ini harus mendapat perhatian karena berfungsi untuk mencegah penghamburan penggunaan devisa yang memang langka itu.
7. Penyediaan fasilitas pendidikan, latihan kerja, pematangan tenaga kerja, dan lain-lain. Aspek ini penting untuk membentuk tenaga-tenaga kerja yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berikut ini akan kita bahas aspek penyampaian produk ke konsumen atau perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya, aspek logistik yang juga berhubungan erat dengan perdagangan.

PROSES PENYAMPAIAN KEPADA KONSUMEN

Tersedianya ratusan macam hasil industri yang terintegrasi merupakan suatu rangkaian pilihan produk, mulai dari bahan mentah sampai dengan hasil-hasil pabrik, termasuk mesin-mesin. Bentuk penyampaian kepada konsumen yang mungkin efektif ialah menyerahkan rangkaian produk tersebut kepada *trading firms* (perusahaan dagang yang sudah mempunyai jalur-jalur spesialisasi). Tetapi inipun tergantung pula kepada sifat produk dan jumlah konsumennya. Menjual mesin misalnya akan berlainan dengan menjual bahan-bahan industri, atau menjual komponen, atau menjual tekstil.

Alternatif kedua ialah menciptakan general trading firm. Dengan adanya serangkaian pilihan produk, maka kita akan membutuhkan pula serangkaian jasa termasuk pembiayaan, pengangkutan, konsultasi, jaringan distribusi nasional dan internasional. Bila *assortment* produk itu diserahkan kepada general trading firms yang mempunyai jalur-jalur spesialisasi, maka perdagangan mungkin tidak dapat dilakukan menurut *economies of scale*, terutama bila kita menyadari bahwa produk yang kita tawarkan itu masih tergolong baru dan masih harus diperkenalkan ke pasar, maka jelas ini membutuhkan sistem dan metode pemasaran profesional dan penyediaan utai

konsumen nasional dan internasional. Semua ini jelas membutuhkan biaya yang tidak kecil yang mungkin tidak akan dapat dipikul oleh perusahaan spesialisasi.

Alternatif ketiga ialah mengadakan pemisahan antara pasar nasional dan pasar internasional. Pasar nasional dapat memilih salah satu dari dua alternatif di atas, sedangkan pasar internasional diserahkan kepada saluran-saluran yang sudah ada. Inipun mempunyai berbagai sub-alternatif, yakni:

1. Mengadakan kerja sama dengan partner kita dalam produksi bila partner tersebut mempunyai aparat pemasaran di negaranya, atau bila ia sudah memiliki jaringan internasional.
2. Mengangkat beberapa *sole-agent* atau distributor di negara-negara yang hendak kita masuki.
3. Menggunakan jasa-jasa general trading firms dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan lain-lain atau mengadakan suatu bentuk usaha patungan dengan mereka berbentuk trading atau *general trading houses*. Dalam hal ini, Taiwan, Singapura sudah mempergunakan jasa-jasa general trading houses, khususnya untuk memasuki pasar Jepang yang terkenal sangat sukar ditembus oleh produsen luar negeri.
4. Menciptakan jaringan tersendiri (khusus untuk negara-negara atau produk-produk tertentu) atau menjualnya franco pabrik, atau menjual langsung ke konsumen dengan membuka L/C, atau menjual dengan sistem konsinyasi (titip). Ada juga yang bekerja-sama secara *ad hoc* dengan importir luar negeri yang bersedia menyimpankan produk tersebut di gudangnya, dan kemudian bersama dengan bank mengelola produk tersebut untuk dijual menurut kebutuhan pembelinya.

Alternatif keempat ialah mengadakan kombinasi alternatif-alternatif di atas. Dari pengalaman yang kita peroleh dalam proses penyampaian tersebut, mungkin kita dapat mengadakan perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di dalam negeri.

Satu hal penting dan menentukan dalam pengambilan keputusan memilih salah satu dari alternatif-alternatif di atas ialah bahwa sektor ekonomi dan bisnis lain harus pula mendukung dan memberikan infrastruktur kepada alternatif yang akan kita ambil itu. Pemilihan alternatif itu tidak bisa lepas dari perkembangan ke arah *diepte* dari industri perbankan, lembaga-lembaga keuangan, perkapalan, asuransi, termasuk tenaga kerja yang berpengalaman. Memilih salah satu dari alternatif-alternatif di atas memang sulit dan menurut pandangan kami memerlukan persiapan yang realistis, rasional, dan dengan kalkulasi yang matang. Usaha persiapan itu bukanlah urusan suatu

Tugas tersebut cukup berat dan kompleks, karena tidak ada satu aparat produksipun meski ia terintegrasi akan dapat melaksanakan tugasnya bila ia tidak didukung oleh aparat atau mekanisme penyampaian ke konsumen yang produktif. Waktu penyerahan yang tepat, kualitas produk yang konstan, persediaan yang merata, pembayaran dan pemberian fasilitas yang tepat merupakan aspek-aspek penting yang semuanya berada di sekitar unsur kepercayaan, dan ini menentukan keberhasilan kita!

Aspek lain yang menentukan pula keberhasilan proses produksi dan proses pemasaran ialah aspek penyediaan atau logistik nasional.

ASPEK LOGISTIK NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA

Program industrialisasi industri yang terintegrasi menghasilkan bahan-bahan mentah industri, barang-barang modal, alat-alat, komponen-komponen, dan sebagainya. Industri manufaktur membutuhkan suatu program logistik nasional yang kompleks.

Pada taraf pertama, yakni pemesanan mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya, sudah memerlukan program logistik yang rapi. Bila sebuah pabrik telah didirikan dan mulai beroperasi, maka sudah harus direncanakan pembelian bahan-bahan dan bahan-bahan industri yang terdapat di dalam negeri perlu dimanfaatkan agar tidak terjadi penghamburan sumber-sumber devisa. Bila pabrik tersebut sudah mulai memproduksi, maka logistik lain diperlukan yakni penyimpanan dan penyaluran produk-produk itu ke pasar nasional dan internasional. Persediaan logistik nasional tergantung pada sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Ia dapat berpusat pada badan-badan pemerintah, atau dapat juga ditangani bersama-sama antara badan-badan pemerintah dan badan-badan swasta; ia harus dilaksanakan secara kontinyu dan harganya harus kompetitif sekali. Misalnya yang telah terjalin antara badan-badan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Korea Selatan tampaknya ingin meniru sistem ini, tetapi kurang berhasil. Negara ini sedang berusaha mengurangi penghamburan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tumpang-tindih (*overlapping*).

Penyediaan logistik di Jepang dilakukan oleh badan-badan seperti: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MITI) bersama-sama Kementerian Keuangan (MOF) dan *Keidanren* (Asosiasi Pengusaha Jepang) serta Badan Urusan Perencanaan Ekonomi (EPA). Badan-badan ini menentukan target makro. Misalnya sektor industri diharapkan menyumbang sebesar X% dari GNP dengan perincian dari sub-sektor industri A diharapkan sumbangan

mentah dan fasilitas untuk membeli bahan-bahan mentah dan sebagainya. Setelah target makro tersebut disiapkan, Keidanren memusyawarahkan hal ini dengan para bisnis dan industriawan dan kemudian merekalah yang kemudian melaksanakan target itu dengan penampilan yang lebih baik dan lebih kompetitif, yakni dengan mempergunakan mekanisme pasar dan harga. Mungkin contoh di atas sangat ideal, karena dalam prakteknya mungkin akan timbul banyak hal yang sifatnya lebih kompleks. Tetapi yang digambarkan di atas sebenarnya "apa yang seharusnya terjadi". Namun demikian tampak "sangat mungkin diimplementasikan dengan berhasil" oleh seluruh aparat pemerintah/birokrasi dan swasta Jepang.

UNSUR-UNSUR YANG SALING MENGUATKAN DAN MELENGKAPI

Tiga unsur ekonomi nasional yang tampak turut menentukan keberhasilan Jepang ialah:

1. Unsur pemerintah: mereka berhasil mengkombinasikan dan memobilisasikan tiga faktor produksi yakni, modal, manajemen, dan teknologi.
2. Dengan keberhasilan memobilisasikan dan mengkombinasikan tiga kekuatan itu, maka mereka mengadakan diversifikasi dan konsentrasi baik vertikal maupun horizontal. Pembentukan kelompok secara vertikal dan horizontal merupakan suatu sistem untuk menekan harga pokok dan biaya sehingga timbul istilah internasionalisasi antara kesatuan ekonomi yang dikuasai. Kelompok-kelompok ini pada umumnya berafiliasi dengan bank-bank besar, mempersatukan produksi dalam bidang manufaktur, menggalang bisnis dan bertindak sebagai pembangkit bisnis. Kelompok ini disebut *Sogo Shosha* (general trading firms gaya Jepang). Sogo Shosha ini kemudian menciptakan suatu jaringan kantor-kantor, cabang-cabang, pusat-pusat komersial, dan lain-lain. Kombinasi modal, manajemen, dan teknologi ditambah oleh jaringan internasional merupakan suatu mekanisme atau sistem yang dipergunakan untuk mengorganisasikan dan melaksanakan logistik nasional Jepang.
3. Dukungan pemerintah dan birokrasi Jepang: Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Liberal (LDP) secara stabil, memberikan kesempatan berkembang kepada dunia usaha dan industri swasta. Kerja sama erat antara sektor bisnis swasta dan pemerintah/birokrasi LDP terwujud dalam bentuk Keidanren dan organisasi ini dalam kegiatannya mendukung Pemerintah Jepang. Birokrasi ini dengan penuh dedikasi menciptakan aparat pendukung pelaksanaan perkembangan ekonomi yakni MITI, MOF, EPA, Departemen Luar Negeri (yang diserahi tugas sebagai diplomasi ekonomi untuk melebarkan pengaruh ekonomi). Para birokrat

teknokrat. Kepandaiannya diterima oleh kalangan politisi, bisnis, dan menteri.

MISI NASIONAL

Kelemahan Jepang dalam hal sumber-sumber alam menyebabkan mereka mengadakan suatu inovasi dan kombinasi antar faktor-faktor - yang kalau satu per satu tidak akan memberikan kekuatan seperti kalau dikombinasikan dan dimobilisasikan. Inovasi inilah yang menyebabkan Jepang dapat mendominasi bisnis internasional dan keberadaannya di arena tersebut akan semakin terasa dan tampak khususnya bagi ASEAN.

Dalam penciptaan sistem terintegrasi kita melihat bahwa:

- a. Kombinasi yang tepat dari pengetahuan, manajemen, organisasi, harus disesuaikan dengan kebudayaan setempat.
- b. Penciptaan jaringan internasional tampaknya merupakan suatu keharusan dalam suatu negara yang strategi ekonominya mengarah ke ekspor.
- c. Pemerintah, birokrasi, dan teknokrat memberikan bimbingan administratif dan menyediakan sarana-sarana yang siap dipakai.
- d. Kepentingan nasional harus berlandaskan rasa misi nasional (*sense of national mission*).
- e. Pengelompokan dilakukan dengan sukarela. Sektor bisnis, industri, perbankan, dan puluhan perusahaan besar telah berhasil menciptakan suatu tingkat internalisasi sebagai penentu harga pokok suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh anggota dari kelompok tersebut. Akibatnya mereka menjadi sangat kompetitif di pasar internasional, misalnya biaya produksi mobil Toyota bisa ditekan lebih rendah US\$ 1.400 dari biaya produksi mobil Ford.
- f. Semangat tim atas dasar *trust*, *subtlety*, dan *intimacy* merupakan syarat yang fundamental.¹

Oleh karena itu, suatu sistem yang terintegrasi harus dibentuk secara ideal untuk menciptakan suatu logistik nasional yang efisien, tepat, kontinyu, kompetitif, dan memperkecil penghamburan berdasarkan mekanisme harga dan pasar. Apakah Indonesia mungkin menciptakan suatu sistem terintegrasi itu mengingat struktur dan organisasi perdagangannya? Dewasa ini, tampak Malaysia sudah memikirkan aspek-aspek tersebut dengan mendirikan tiga perusahaan besar gaya Sogo Shosha.

ASPEK KEUANGAN

Bila program industrialisasi yang lebih terintegrasi akan dilaksanakan, maka seperti sudah dikatakan jumlah modal jangka panjang, modal kerja, *post-finance assortment product/services*, dan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan prasarana penyampaian produk ke konsumen nasional dan internasional, harus mengalami *deepening* di sektor pembiayaan nasional (*in-depth finance*). Perkembangan industrialisasi di Singapura dan Hongkong, misalnya, sejalan dengan perkembangan sektor industri perbankan dan keuangan. Bahkan kedua negara tersebut telah menempatkan diri mereka sebagai pusat-pusat keuangan. Perkembangan pusat-pusat keuangan itu tidak saja memperlihatkan perkembangan lembaga-lembaganya tetapi juga perkembangan dan penggunaan assortment dan *sophistication* alat keuangan (*money/financial investment*), dan keahlian tenaga kerjanya. Dari sudut kelembagaan, kita melihat pertumbuhan bank-bank komersial (dengan mengadakan kerja sama dengan bank-bank komersial yang lebih besar dan kuat), *merchant bank* (dengan mengadakan kerja sama dengan merchant bank nasional dan internasional), *discount houses*, *money dealers*, *security houses*, *unit-trust corporations*, *acceptance houses*, *finance companies*, *money brokers*, pasar bursa, dan lembaga-lembaga seperti *brokerage*. Lapangan kerja badan-badan keuangan ini memang terlihat tumpang-tindih. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa batas-batas tradisional (*traditional boundaries*) tidak lagi dimonopoli oleh bank-bank tetapi perkembangan industri dan perdagangan di dunia internasional telah mendorong bank-bank mencari bentuk-bentuk kegiatan dan pola yang lain dari usaha-usaha tradisional tersebut. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, perusahaan-perusahaan besar dan menengah sangat tergantung kepada dana-dana dari bank-bank komersial sebagai modal kerjanya. Perusahaan-perusahaan itu dapat menarik modal kerja melalui surat-surat komersial langsung dari pasar uang dan modal, atau dapat juga melalui penjualan saham atau surat hutang melalui *security houses* atau bursa. Para deposan bank-bank di Amerika Serikat dapat memilih antara menyimpan modalnya di bank-bank komersial atau melalui *money market* yang berbunga lebih tinggi daripada deposito di bank-bank. Ini berarti bahwa bank-bank mulai mendapat saingan dari lembaga-lembaga keuangan, karena mereka dapat "menggerogoti" sistem perbankan komersial yang mempunyai *grass root* dari deposan dan pemegang giro. Oleh karena itu, bank-bank harus dapat memberikan jasa-jasa yang lebih bersifat terintegrasi dan memasuki bidang-bidang yang dahulu didominasi oleh lembaga-lembaga keuangan.

Bank-bank komersial di Jepang mengalami perkembangan yang hampir sama. Bank-bank komersial Jepang mempunyai likuiditas yang cukup tinggi

Jepang waktu itu. Dewasa ini, para perusahaan besar sudah dapat menarik dana langsung dari security houses, atau dari pasar internasional. Pada prakteknya, perusahaan-perusahaan besar Jepang (dikenal dengan nama *Sogo Shosha*) sudah bertindak sebagai kuasi-bank yakni dengan memberi berbagai bentuk kredit kepada pihak pembeli, seperti kredit selama 180 hari untuk pembelian bahan-bahan baku, dan jangka waktu lebih lama untuk peralatan, atau bertindak sebagai penjamin kepada pihak bank dalam hal pemberian kredit untuk pembelian mesin-mesin yang bersifat jangka panjang dan menengah.

Perkembangan dan perubahan yang sedang terjadi di negara-negara industri, seperti Jepang dan Amerika Serikat, mungkin akan atau sudah mempunyai pengaruh pada pusat-pusat keuangan, seperti Singapura dan Hongkong. Banyak perusahaan di Singapura dan Hongkong mencari modal langsung pada pasar uang dan modal melalui penjualan saham atau surat hutang dari perusahaan-perusahaan yang sebagian besar sudah *go public* atau yang dikenal di sana dengan istilah *publicly listed companies*. Modal tersebut bersifat jangka panjang dan penarik modal ikut bertanggung jawab atas resiko yang diambil oleh perusahaan. Bunga yang harus mereka bayar bisa ditekan serendah mungkin. Bank-bank komersial di negara-negara tersebut sering ikut serta memegang ekuiti atau meminta *option* bila ia membiayai atau menjamin suatu pemberian kredit. Oleh karena itu mereka ikut menikmati pertumbuhan perusahaan yang diberi kredit. Hong Kong and Shanghai Bank, misalnya pernah ikut serta dalam "operasi penyelamatan" Hutchinson dengan mengambil alih lebih dari 26% saham perusahaan tersebut. Ketika Hutchinson sudah "pulih" kembali dan ada pembeli yang menawarkan dengan harga yang tinggi, maka bank tersebut menjual kembali sahamnya dengan keuntungan yang hampir berjumlah ratusan juta dollar Hongkong.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa pengaruh perkembangan industri sudah terasa di negara-negara industri, dan bukan mustahil juga akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Grup-grup besar seperti Lim Soei Liong, Garuda, Astra, dan lain-lain kini sudah dapat menarik modal dengan cara-cara lain daripada meminjamnya dari bank-bank komersial.¹ Grup-grup itu dapat menekan tingkat bunga dengan mengadakan *interest mix*.

Perkembangan di bidang industri, telah menyebabkan perbankan Amerika Serikat dan Jepang "menyeberang" ke pusat-pusat keuangan London, Singapura, Hongkong, dan lain-lain. Industri perbankan harus mengadakan reorientasi, perumusan kembali, penilaian kembali, penciptaan tenaga kerja

¹ Grup Indonesia baru saja meraih US\$ 120 juta dari pasar modal internasional.

yang sesuai, pengkombinasian baru dengan lembaga-lembaga keuangan, dan mengorganisasikan diri dengan *alignments* baru agar industri perbankan tetap dapat menyediakan serangkaian jasa kepada sektor lain yang tidak lagi bersifat tradisional. Perkembangan di bidang komputer akan mengakibatkan suatu "revolusi" dalam industri perbankan. Apakah industri perbankan kita juga tidak didorong untuk meninjau kembali tugas-tugasnya yang semakin beraneka ragam ini agar industri ini dapat selalu mempersiapkan diri untuk menyediakan serangkaian pilihan jasa?

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN INDUSTRIALISASI TER-INTEGRASI: SUATU KEMUNGKINAN

Barangkali kita perlu mengadakan suatu inventarisasi singkat mengenai sumber-sumber yang menurut pandangan penulis merupakan suatu kemungkinan. Dalam kenyataan, tentu akan timbul sumber-sumber lain yang belum dapat dibahas dalam kertas kerja singkat ini.

1. Modal Jangka Panjang

Pada umumnya sumber modal jangka panjang masih langka, terkecuali bila bursa kita berkembang seperti di pusat-pusat keuangan.

2. Pemegang Saham

Orang-orang yang memutuskan ingin mendirikan suatu perusahaan harus menyediakan modal dalam bentuk pembelian atau penyeteroran saham. Bila usaha tersebut membesar, maka ia memerlukan tambahan modal yang sifatnya jangka panjang. Para pemegang saham mempunyai beberapa alternatif, misalnya mencari kelompok bermodal lain (tetapi ini kurang disenangi, karena ini berarti masuknya orang luar), atau mengajukan permohonan melalui bank-bank negara kepada bank sentral untuk memberikan sejumlah kredit investasi (tetapi jumlahnya tidak bisa besar), atau meminta kredit kepada bank-bank luar negeri di Singapura, Hongkong, Eropa, dan pusat-pusat keuangan lainnya. Bila yang terakhir ini berbentuk pembelian mesin, maka pabrik di luar negeri dapat mencari pemasok kredit yang mempunyai hubungan baik dengan salah satu bank. Hal seperti ini bisa diterapkan bila kita membeli mesin dari Jerman Barat, Perancis, dan Jepang. Taiwan melakukan hal ini tetapi melalui bank di Hongkong. Di antara mereka ada

persetujuan di "bawah tangan" dengan memasukkan mesin sebagai "saham". Akhir-akhir ini, sudah ada perusahaan/industriawan yang berhasil mengadakan pinjaman terindikasi di pasar modal Hongkong dalam jumlah yang cukup besar.

3. Bank-bank Negara/Bank Sentral¹

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo): Bank ini tergolong bank yang memberikan pinjaman modal jangka panjang. Hal ini tentu harus didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti rentabilitasi, golongan kuat dan lemah, kelayakan, dan sebagainya. Bapindo merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berdasarkan undang-undang diperkenankan memegang saham perusahaan industri. Bank ini baru saja mengambil alih saham-saham milik partner asing dari salah satu usaha patungan (PMA) yakni Tri Usaha Bhakti/Weyer-house. Bapindo juga memegang saham berbagai usaha industri antara lain industri tekstil dan plastik.

Bank-bank Pemerintah: Bank Bumi Daya, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia tergolong sebagai bank-bank besar yang menguasai hampir 84% dari sumber-sumber keuangan nasional. Bank-bank ini pada dasarnya tidak diperkenankan memegang saham perusahaan kecuali dengan izin atau perusahaan tersebut mempunyai hutang yang tidak dapat dikembalikan dan diambil alih sementara untuk dijual kembali kepada peminat seperti yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan Tungsram, Pepsi Cola, Plywood Factory di Sumatera Selatan, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan itu telah diambil alih tetapi sudah dijual kembali kepada pengusaha-pengusaha swasta yang telah melunasi hutang perusahaan-perusahaan tersebut. Bank-bank negara tergolong dalam lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dalam jumlah yang besar seperti dalam bentuk konsorsium. Mereka juga memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan negara termasuk PNP, PNP Gula, Garuda, Pertamina, PN Timah, dan lain-lain. Dalam pemberian kredit itu termasuk program *uitbreiding*. Dana-dana yang disediakan oleh bank-bank negara itu pada umumnya bersifat deposito jangka pendek, tetapi dalam praktek sering kredit-kredit tersebut diberikan untuk jangka menengah dan panjang (melalui sistem *roll-over*). Bank-bank negara tidak saja mensuplai dana-dana ke sektor komersial tetapi juga ke sektor-sektor industri, bisnis, dan ekonomi lainnya di Indonesia, seperti ikut sertanya Bank Negara Indonesia dalam loan syndication Astra Group.

Beberapa bank negara mempunyai cabang, seperti misalnya BNI 1946 mempunyai cabang di Hongkong, Singapura, dan Tokyo, sedangkan bank-

bank negara lainnya mempunyai kantor representatif di Singapura dan kota-kota pusat keuangan lainnya. Bank-bank negara merupakan pemegang saham Indover Bank yang berdomisili di Negara Belanda (Amsterdam), dengan cabang di Frankfurt dan sedang mempersiapkan cabang di New York.

Beberapa waktu yang lalu, bank-bank negara masih menaruh dana dollar dan mata uang asing lainnya di bank-bank asing di luar negeri, tetapi dewasa ini mereka sudah sebagian menempatkan dana-dana tersebut di cabang-cabang mereka di Hongkong, Singapura, Tokyo dan mungkin juga di Indover Amsterdam. Dengan menempatkan dana-dana dalam bentuk deposito atau giro di cabang-cabang di luar negeri, maka ini berarti bahwa kedudukan bank-bank negara kita di pasar uang dan modal internasional menjadi kuat. Dengan demikian mereka juga sudah dapat digolongkan sebagai pemasok dana-dana dollar di pasar internasional. Mereka juga sudah mampu "berbicara" sebagai manajer atau sub-manajer dari berbagai pinjaman terindikasi untuk Pemerintah Indonesia atau pengeluaran surat-surat hutang yang dilakukan di pasar uang dan modal Jepang dan Jerman Barat. Dalam waktu dekat, mereka juga akan turut serta secara aktif untuk memanfaatkan berbagai alat-alat keuangan, seperti misalnya CD.

4. Bank-bank Swasta

Bank Devisa Swasta: Bank-bank devisa nasional sudah memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat dilihat dari sudut *total asset* mereka; beberapa di antara mereka sudah memiliki total asset sebesar Rp. 100 milyar, sehingga kapabilitas mereka sebagai sumber modal kerjapun meningkat. Sebagian besar dari bank-bank ini sudah memberikan berbagai jenis kredit kepada sektor industri walaupun masih bersifat jangka pendek atau menengah, tetapi dengan sistem roll-over maka kredit ini bisa menjadi jangka panjang. Di antara mereka bahkan sudah ada yang dapat menarik modal melalui sumber-sumber di luar negeri, bahkan pernah menawarkan loan syndication. Ini disebabkan jaringan koresponden dan mungkin juga perjanjian teknis mereka sudah memungkinkan mereka untuk menarik modal asing melalui sistem sindikasi.

Pertumbuhan bank-bank devisa swasta ini berbeda-beda dan tergantung kepada komposisi pemegang sahamnya. Peningkatan asset mengakibatkan kenaikan permintaan modal oleh Bank Sentral. Bila asset mereka mencapai Rp. 200 milyar, apakah masih mungkin bagi para pemegang saham untuk terus menerus memasukkan modalnya ke bank tersebut? Tidakkah mereka harus mencari modal di luar lingkungan, atau menarik modal dari bursa?

Menarik modal dari luar lingkungan membutuhkan persetujuan "harga

dari bursa memerlukan ketentuan-ketentuan Bapepam dan persetujuan Bank Indonesia.

Bank-bank devisa swasta dalam tahun-tahun mendatang seharusnya dapat menerapkan sistem *pooling* untuk menangani pemberian pinjaman atau pembiayaan proyek-proyek yang agak besar secara bersama-sama. Proyek-proyek yang *on-stream* membutuhkan biaya yang jauh lebih besar, sehingga ada baiknya bila bank-bank swasta mulai dari sekarang memikirkan penciptaan suatu mekanisme yang dapat menangani proyek-proyek itu bersama-sama. Dewasa ini bank-bank swasta menguasai sumber dana nasional kurang lebih sebesar 8,5% saja. Ini tergantung kepada kebijaksanaan Bank Sentral; bila mereka diberi ruang gerak yang lebih luas, saya yakin bank-bank swasta tersebut akan merupakan "asset nasional" terutama dalam rangka penarikan dan penyaluran dana-dana dari pasar modal dan uang internasional. Saya yakin bahwa mereka sudah mampu untuk mengorganisasi berbagai macam konsorsium. Hubungan bank-bank nasional itu (devisa dan nondevisa) dengan lembaga-lembaga keuangan di pasar uang dan modal internasional sudah cukup baik dan memperlihatkan *standing* tertentu, terutama dengan lembaga-lembaga seperti World Bank dan bantuan luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu mungkin perlu ditinjau kembali pemberian kesempatan kepada bank-bank nasional itu untuk menarik manfaat dari dana-dana internasional untuk kepentingan nasional!

Bank-bank Swasta Asing: Persentase kredit yang disalurkan melalui bank-bank swasta asing dapat dikatakan hampir sama besarnya seperti persentase kredit yang disalurkan oleh bank-bank swasta nasional yakni lebih kurang 5,6%, walaupun jumlah bank swasta asing di Indonesia hanya 10 buah dibandingkan dengan 75 buah bank swasta nasional.

Bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia umumnya merupakan cabang dari bank-bank besar yang mempunyai jaringan internasional, seperti City Bank N.A., Bank of America, Chase Manhattan Bank, Hong Kong and Shanghai Bank, American Express, The Chartered Bank, Bank of Tokyo, dan lain-lain. Di sini mereka selain menguasai 5,6% dari sumber-sumber keuangan nasional, mereka juga bertindak sebagai penghubung dan pengatur berbagai kredit yang disalurkan melalui cabang-cabang mereka di Hong Kong, Singapura, dan kota-kota besar lain, dalam bentuk pinjaman *off-shore*, misalnya.

Adanya bank-bank swasta tersebut mempunyai arti yang penting untuk memberikan kesempatan kepada penempatan dana mereka yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini disebabkan jaringan dan mobilitas modal mereka! Mereka tampaknya menandalkan kepada pinjaman *off shore* yang merupa-

country allocation. Bank-bank tertentu sangat mengharapkan keuntungan dari kegiatan-kegiatan mereka di luar kantor pusatnya.

Perwakilan Bank-bank Asing: Dalam hubungan ini, kita tidak bisa mengabaikan perwakilan bank-bank asing yang melakukan kegiatannya di Jakarta, Singapura, Hongkong, dan kota-kota lain. Seperti telah dikatakan, modal atau uang mempunyai mobilitas yang hampir tidak terbatas. Oleh karena itu transaksi yang mungkin tidak diperkenankan diselenggarakan di Jakarta, dalam praktek dapat dilangsungkan di pusat-pusat keuangan seperti Singapura dan Hongkong. Di Singapura dan Hongkong mungkin terdapat hampir 100 perwakilan dan lembaga keuangan yang aktif dan bertujuan menyalurkan dana mereka ke Indonesia. Dewasa ini sulit memperhitungkan jumlah dana yang disalurkan ke Indonesia, akan tetapi melihat jumlah perwakilan lembaga-lembaga keuangan, maka diperkirakan jumlah dana tersebut besar. Kelompok perwakilan lembaga-lembaga keuangan ini merupakan *beach-head* dari lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai potensi besar. Mungkin lambat-laun kita harus dapat menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan gambaran mengenai jumlah pinjaman off-shore yang masuk ke daerah kita. Salah satu bentuk mekanisme itu ialah kerja sama atau perjanjian kerja dengan bank-bank nasional swasta!

Lembaga-lembaga Keuangan (Finance Companies): Ada dua jenis lembaga keuangan: (a) *development finance company*, seperti PT. Bahana, PT. Private Development Finance Company, dan PDFCI; (b) *merchant bank type*, seperti Ficor Invest, MIFAC, ASEAM, Multicor, dan sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan ini mempunyai potensi karena mereka berafiliasi dengan bank-bank besar seperti dengan First Chicago, Fuji Bank, dan lain-lain, atau berkombinasi dengan bank-bank negara atau swasta.

Perkembangan lembaga keuangan tipe merchant bank masih belum merata. Ada yang sudah maju karena didukung oleh bank-bank negara, atau karena mempunyai sumber-sumber dana Rupiah yang relatif kuat. Pada umumnya perkembangan mereka cukup menggembirakan dalam arti perolehan *klientele* yang tidak saja terbatas pada usaha patungan, tetapi juga pada usaha dan proyek-proyek nasional.

Pada mulanya, beberapa merchant bank masih kuatir untuk membiayai perusahaan-perusahaan nasional, karena mereka mempunyai kualifikasi perusahaan kelas satu berdasarkan ketentuan kantor pusat mereka. Dalam kriteria tersebut, hanya perusahaan asing, atau partner asing, atau usaha patungan yang tergolong perusahaan kelas satu. Dewasa ini tampak sudah ada penyesuaian kriteria tersebut dengan kondisi dan situasi Indonesia. Ini terbukti dari adanya perusahaan/proyek nasional yang dibiayai oleh para mer-

memuaskan. Mereka merupakan sumber dana yang penting melihat keterbatasan kemampuan pemberian kredit bank-bank negara dan swasta. Para merchant bank sudah mampu mengadakan pooling atau konsorsium bila perlu, karena sistem ini sudah biasa mereka lakukan di luar negeri.

Selain itu, merchant bank juga aktif dalam melakukan *underwriting* (jaminan) perusahaan-perusahaan yang akan go-public. Mereka hampir tidak mempunyai resiko karena semua isu yang menjadi tanggung jawab mereka selalu mengalami *over-subscription*. Sampai saat ini, mereka belum mengadakan jaminan untuk perusahaan nasional, tetapi ini hanya soal waktu. Sudah ada beberapa perusahaan nasional dan industri swasta nasional yang mengadakan perundingan dengan salah satu merchant bank.

Kita hendaknya bisa memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan ini karena mereka mempunyai hubungan erat dan langsung dengan dunia keuangan dan permodalan internasional. Kita tidak perlu menggunakan merchant bank yang berada di Singapura, Hongkong, tetapi sebaliknya lebih baik menggunakan merchant bank yang berdomisili di Indonesia untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan di luar negeri.

5. Lembaga-lembaga Nonbank Lainnya

PT. Danareksa: Lembaga ini bertindak sebagai unit *trust company*. Perusahaan ini menjadi penjamin dan pemegang saham berbagai perusahaan yang go-public dan menarik modal dari penjualan sertifikat kepada publik. Modal pertama disediakan oleh pemerintah dengan penjualan sertifikat itu. Dengan demikian lembaga ini mempunyai sumber baru dari masyarakat.

Menurut pendapat saya, sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mendirikan "danareksa-danareksa" lain. Ini akan menimbulkan persaingan yang sehat demi kemajuan dan perkembangan bursa kita yang merupakan sumber nasional terpenting baik dalam arti dana maupun sebagai mekanisme pemilikan yang lebih merata. Ini akan membantu perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh kelompok atau keluarga agar dapat go-public. Tentu saja ketentuan untuk danareksa swasta harus ketat karena kegiatan ini melibatkan dana masyarakat. Adanya satu danareksa mungkin dilihat dan dianggap sebagai monopoli saja, karena satu lembaga dilihat kurang mendorong perkembangan bursa karena di masa mendatang akan lebih banyak lagi proyek yang on-stream. Perkembangan di bidang industri harus disertai oleh perkembangan bidang lain khususnya bursa. Perkembangan bursa penting tidak saja dalam arti penarikan dana, tetapi dalam hal pengadaan pemilikan yang menvehar dan merata sehingga akan

6. Usaha-usaha Lain

Usaha-usaha lain, seperti Askrido, PT Papan, yayasan-yayasan dari berbagai instansi, dana pensiun, asuransi, bank, dan sebagainya merupakan sumber-sumber dana yang juga penting. Bila usaha mereka bisa dikoordinasikan dan diketahui kapabilitas mereka, maka jumlah dana yang mereka hendak tanam tidaklah sedikit. Sumber-sumber ini sering tidak mendapat perhatian kita dan merekapun secara resmi tidak berada di pasar uang dan modal! Mungkin kita perlu menciptakan suatu mekanisme atau wadah untuk mengetahui potensi mereka agar dana mereka dapat disalurkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat untuk perkembangan nasional.

KESIMPULAN

Kebijakan untuk program industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional akan menimbulkan berbagai perubahan dan akibat terhadap investasi, perdagangan, dan kebutuhan (*requirements*) kepada keuangan. Apakah lembaga-lembaga keuangan - baik negara maupun swasta dan perbankan nasional sudah kapabel untuk menampung demikian banyak kebutuhan kredit dan keuangan? Sebagian dari lembaga-lembaga keuangan dan perbankan kita mungkin sudah mampu menampungnya, tetapi yang diperlukan mungkin jauh lebih besar lagi! Lembaga-lembaga yang beroperasi di sini umumnya masih bersifat *in de breedte* dan belum *in de diepte*. Menurut pandangan penulis, studi mengenai industrialisasi yang terintegrasi hendaknya disertai oleh studi mengenai perdagangan dan keuangan, karena perdagangan dan keuangan merupakan sarana-sarana vital yang memungkinkan pelaksanaan program industrialisasi yang terintegrasi tersebut.

Appendix I

KELOMPOK INDOCEMENT DAPAT PINJAMAN USS 120 JUTA

Pada tanggal 6 Nopember 1981 yang lalu di Hotel Mandarin Singapura telah ditandatangani perjanjian pinjam-meminjam antara sebuah konsorsium 29 bank "Syndicate & Loan", dipelopori (lead-managers) oleh American Express International Banking, Credit Lyonnais, BNI 1946; Banque de L'Indochine et de Suez dengan kelompok Indocement dari Lim Soei Liong (PT Perkasa Inti Abadi Indocement dan PT Perkasa Inti Abadi Mulia) sejumlah US\$ 120 juta untuk jangka waktu delapan tahun. Bunga 30 bulan pertama ialah 1½% di atas LIBOR, yakni bunga antar bank-bank rata-rata yang ditawarkan di Singapura. Melihat bunga umum dewasa ini, spread 1½% dapat dikatakan rendah, yang biasanya hanya dikenakan kepada perusahaan langganan utama (besar dan dipercaya) di pasar off-shore. Setelah 30 bulan, bunga yang harus dibayar

Pinjaman ini diperlukan untuk perluasan dua pabrik semen tersebut berupa penambahan dapur (kiln), sehingga produksi pabrik tersebut dapat ditingkatkan. Hal ini untuk menanggapi peningkatan pembangunan-pembangunan dan konsumsi semen dalam negeri. Sejak beberapa tahun terakhir, semen mulai diekspor dengan bonus penggalak. Tetapi akhir-akhir ini, karena pasar domestik harus lebih dilayani dan pasar luar negeri agak sepi, maka jumlah ekspor semen jauh di bawah kuota ekspor (404.000 ton) yang diberikan yakni lebih kurang 235.000 ton semen sampai pertengahan bulan Oktober 1981.

PRODUKSI DAN PEMAKAIAN BATU GAMPING

Produksi dan pemakaian batu gamping dan lempung pabrik-pabrik semen adalah sebagai berikut:

PRODUKSI DAN PEMAKAIAN BATU GAMPING

	1978	1979
PT Semen Gresik		
Batu gamping	775.496,40	1.535.910,00
Lempung	159.266,50	398.577,60
Semen yang dihasilkan	639.490	1.177.378,00
PT Semen Padang		
Batu gamping	441.016,27	448.491,00
Lempung	101.240,27	115.688,00
Semen yang dihasilkan	339.766	361.525,00
PT Semen Tonassa		
Batu gamping	151.102,70	169.753,00
Lempung	36.988,75	41.152,00
Semen yang dihasilkan	114.081,12	128.601,00
PT Semen Cibinong		
Batu gamping	1.373.573,45	1.377.817,00
Lempung	315.350,45	334.016,00
Semen yang dihasilkan	1.058.233	1.043.801,00
PT Indocement		
Batu gamping	1.226.839,75	1.716.454,00
Lempung	281.662,75	416.110,00
Semen yang dihasilkan	945.177	1.300.344,00
PT Semen Nusantara		
Batu gamping	730.929	858.932,00
Lempung	135.897	155.985,00
Semen yang dihasilkan	597.400	686.384,00
Jumlah produksi semen	3.694.137,12	4.698.033,00

Sumber: *Business News* 3677, 11-11-1981.

Jumlah produksi tahun 1979 sebanyak 4.698.033 ton, 548.738,50 ton telah diekspor. (Sumber: Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar).

Produksi selama tahun 1980/1981 ialah 5.851.759 ton. (Lampiran Pidato Presiden 15 Agustus

Appendix II

PERBANKAN DI INDONESIA

Salah satu ciri dari sistem keuangan Indonesia yang menonjol adalah peranan yang besar dari lima bank "besar" milik negara. Mereka adalah Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BNI 1946, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Secara kuantitatif lima bank negara ini menguasai lebih kurang 80% dari seluruh sumber keuangan dunia perbankan di Indonesia.

Sebaliknya peranan bank-bank nasional swasta dapat dikatakan kecil sekali, jika diingat maksud pemerintah untuk menggalakkan bisnis swasta. Peranan mereka hanya 10% dan ini berada di tangan 75 bank dalam tahun 1980. Sebelumnya, dalam tahun 1971 jumlah mereka lebih banyak yakni 129 buah. Kelihatan mereka kecil-kecil dan tidak semuanya diurus dengan baik, serta banyak yang dalam keadaan "meroyan". Kini mulai tampak perbaikan-perbaikan karena adanya merger-merger. Sepuluh bank asing di 20 buah kantor, memegang 10% bisnis.

PERANAN BANK SENTRAL

"Bapak" dari perbankan di Indonesia yang pantas disinggung ialah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bukan tidak saja menjalankan tugas tradisional seperti mengeluarkan mata uang rupiah, mengurus cadangan valuta asing, memberikan fasilitas kredit *lender of last resort*, mengatur kredit dan keuangan, menjadi agen pajak untuk pemerintah, mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain dengan maksud menjaga kestabilan harga, neraca pembayaran, dan kekuatan rupiah, dan lain-lain, tetapi juga aktif dalam pengembangan dunia perbankan itu sendiri. Peranan aktifnya ialah membangun sistem keuangan, yang amat kacau terutama pada tahun-tahun terakhir Orde Lama. Keadaan ekonomi dalam dan luar negeri waktu itu sangat merosot. Bank-bank Belanda yang masih ada telah dinasionalisasikan, sedang bank-bank asing lain ditutup. Bank Indonesia, di bawah tekanan keras, mengeluarkan kredit-kredit secara serampangan. Banjir uang karena pemerintah mencetaknya terus. Bank Indonesia seolah-olah lumpuh untuk tugas pengontrolan uang dan kredit. Dalam masa Orde Baru keadaan tersebut segera berubah. Peraturan baru, seperti Undang-undang Pokok Bank 1967, Undang-undang Pokok Bank Asing 1968, dan Undang-undang Pokok Bank Sentral 1968, dan undang-undang pemulihan kedudukan lima bank negara dikeluarkan. Bantuan-bantuan berupa dana pinjaman-pinjaman tetap (jadi bukan sebagai pemberi pinjaman) diberikan. Bantuan likuiditas diberikan kepada bank-bank nasional swasta meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Jumlah bantuan yang diberikan kepada bank-bank negara itu, selama periode 1967 sampai 1971, kira-kira 55% dari deposito perbankan. Sistem *rediscount* dan *refinancing* fasilitas-kredit, rencana-rencana kredit investasi khusus, dan pinjaman-pinjaman untuk proyek-proyek pekerjaan umum, menambah kemampuan bank-bank negara. Untuk membiayai pupuk dan lain-lain yang disalurkan melalui Bank Rakyat dengan pembiayaan kembali dari Bank Indonesia dibuat skema kredit pertanian. Ini ditambah lagi oleh program-program lain seperti kredit untuk investor kecil (KIK), kredit modal kerja tetap (KMKP), kredit mini dan kredit untuk pedagang kecil (KCK).

Bank Indonesia juga membantu penguatan dasar modal bank-bank negara yang dianggap kurang sesuai dengan pertumbuhan yang cepat. Kini sambil menunggu persetujuan parlemen, sebagian kredit refinancing itu dibekukan dan dimasukkan dalam cadangan untuk modal-dibayar bank negara dan tidak dikenakan bunga. Modal Rp. 300 juta untuk bank seperti Bank Bumi Daya, misalnya, kelihatan amat "kecil" karena omzetnya sampai akhir 31 Maret 1981 terasat lebih dari

Bantuan Bank Indonesia kepada bank-bank pemerintah lain tidak terbatas pada soal penyediaan dana dan fasilitas-fasilitas saja. Ia juga memberi asistensi teknis dan pengadaan rencana latihan untuk meningkatkan operasi dan manajemen bank-bank negara. *Upgrading* ini merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan selanjutnya. Ia memberikan juga petunjuk-petunjuk mengenai akuntansi, *audit*, prosedur pinjaman, pelaporan, relasi internasional, dan manajemen personalia. Ongkos-ongkos untuk memodernisasikan operasi perbankan inipun disediakan oleh Bank Indonesia.

830 BUAH

Dalam tahun 1980, lima buah bank negara di atas kini mempunyai 830 buah kantor (tahun 1969, 600 buah). Jumlah ini dirasakan masih belum memadai dengan kebutuhan terhadap bank.

Pemerintah menguasai ± 80% dari sumber-sumber keuangan di Indonesia. Ini terlihat dari angka-angka berikut ini:

PINJAMAN PERBANKAN (dalam milyar rupiah)

	Desember 1980	Agustus 1981	
1. Bank Indonesia			
(pinjaman langsung)	2.454	2.406	(26,31%)
- Dalam rupiah	2.454	2.406	
- Dalam valuta asing	-	-	
2. Bank-bank Umum Pemerintah			
(termasuk Bapindo dan likuiditas)	4.301	5.247	(57,36%)
- Dalam rupiah	3.960	4.910	
- Dalam valuta asing	341	337	
3. Bank-bank Swasta Nasional			
(termasuk kredit likuiditas)	566	775	(8,47%)
- Dalam rupiah	560	762	
- Dalam valuta asing	6	13	
4. Bank Pembangunan Daerah			
- Dalam rupiah	145	204	(2,23%)
- Dalam valuta asing	-	-	
5. Bank-bank Asing			
- Dalam rupiah	359	465	(5,63%)
- Dalam valuta asing	55	50	
Jumlah	7.880	9.147	(100%)

Sumber: Laporan Mingguan Bank Indonesia, No. 1167.

PERKEMBANGAN BANK-BANK SWASTA NASIONAL

Dari angka-angka tersebut, jelas terlihat bahwa peranan bank swasta nasional masih kecil. Bantuan refinancing kredit mereka oleh Bank Indonesia kepada bank-bank swasta nasional yang berjumlah 75 buah pada akhir 1980 itu, masih jauh lebih kecil daripada fasilitas yang diberikan kepada bank-bank umum pemerintah. Bank Indonesia kelihatannya mencoba mendorong perbankan nasional swasta yang bermodal lemah itu dengan menganjurkan bank-bank swasta tersebut mengadakan merger. Pemerintah memberikan kelonggaran berbagai pajak dalam pelaksanaan 'perkawinan-perkawinan' tersebut.

Kemajuan-kemajuanpun tampak! Antara lain dengan adanya kerja sama dengan bank-bank asing. Perbandingan peranan bank pemerintah dan swasta masih tetap pincang, yakni 8:1. Rupanya dana-dana tetap 'disedot' oleh lima bank raksasa pemerintah tersebut. Sebabnya, mereka mengontrol dana perusahaan-perusahaan pemerintah yang menguasai bidang-bidang utama seperti pertanian, pertambangan, transpor dan komunikasi, perindustrian, perdagangan, proyek-proyek anggaran belanja, dan sebagainya. Perusahaan pemerintah tidak boleh atau tidak bebas menyalurkan dananya melalui bank-bank swasta nasional. Alasannya: bank-bank swasta nasional kebanyakan belum mempunyai manajemen dan administrasi yang baik. Untuk meng-upgrade mutu perbankan Indonesia, Bank Indonesia menganjurkan kerja sama antara bank swasta nasional dengan bank-bank pemerintah atau dengan bank-bank asing. Maka tampak lima bank swasta nasional mengadakan kerja sama dengan bank-bank umum pemerintah dan dua bank asing. Peluang ini kelihatannya akan bertambah besar karena minat bank-bank asing untuk bekerja di Indonesia bertambah besar. Karena mereka tidak diijinkan melayani langgan-langgan di luar Jakarta, maka satu-satunya jalan adalah beroperasi bersama dengan bank swasta nasional.

BANK-BANK PEMBANGUNAN

Yang dirasakan kurang dewasa ini adalah bank-bank yang bergerak dalam bidang investasi, yang biasa memberikan kredit jangka menengah atau jangka panjang. Dalam hal ini pihak bank nasional swasta kembali terbentur pada hal dana. Oleh karena itu, banyak dari mereka hanya aktif sebagai bank komersial, memberikan kredit-kredit jangka pendek, dan menerima deposito jangka pendek pula.

Usaha pemerintah dalam pembentukan lembaga-lembaga keuangan yang memperhatikan faktor pembangunan (jangka panjang) bukan tidak ada. Dalam bidang ini, pemerintah membentuk Bank Pembangunan Indonesia (dahulu namanya Bank Industri Negara). Kemudian di setiap propinsi dibentuk bank-bank daerah (26 buah). Mereka kebanyakan merupakan penyalur dana-dana proyek anggaran belanja, yang uangnya didrop dahulu pada bank-bank umum negara. Usaha mengumpulkan dana lain dilakukan melalui deposito rekening koran berjangka atau Tabanas dan Taska.

Bank Pembangunan Indonesia pernah mengeluarkan surat hutang jangka menengah/panjang untuk mendapat dana untuk modal investasi. Karena banyak bank daerah tak dapat berkembang hanya dengan operasi ini, maka beberapa bank pembangunan itu berfungsi sebagai bank umum. Bapindo mendapat sokongan penuh berupa fasilitas-fasilitas rediskonto dan pembiayaan kembali dari Bank Indonesia. Bank-bank Pembangunan Daerah juga mendapat fasilitas pembiayaan kembali jika ia dinilai baik. Bapindo bekerja sama dengan Indonesian Development Finance Com-

tu industri rakyat. Selanjutnya, Bank Indonesia membantu dalam hal pendidikan dan kaderisasi perbankan wilayah dengan latihan-latihan manajemen dan sebagainya.

BANK-BANK ASING

Biasanya bank-bank asing memasuki sebuah negara bersamaan dengan penanam-penanam modal asing, yang sudah mempunyai langganan di negara induknya dan melanjutkan pelayanannya di luar negeri. Tidak ada bank asing yang 'menyelonong' masuk semata-mata untuk mencari langganan baru. Sebagian besar dari bisnisnya harus berada di tangan dahulu, karena risikonya besar.

Bank-bank asing di Indonesia, kecuali mungkin Bank Belanda dan Inggeris yang telah mengenal seluk-beluk bisnis di sini, mulai masuk berbarengan dengan modal asing misalnya dalam bidang minyak, tembaga, nikel, industri manufaktur, perkayuan, kimia, dan sebagainya. Dasar hukum yang membukakan pintu bagi mereka adalah Hukum Bank-bank Asing 1968.

Sepuluh cabang bank luar negeri dengan 20 kantornya didirikan dalam waktu yang singkat. Permintaan lisensi baru mengalir terus, tetapi jumlah bank asing dibatasi. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikeluarkan ijin-ijin bank baru, kecuali untuk kantor perwakilan.

Bank-bank asing tidak diijinkan membuka kantor di luar Jakarta. Untuk beroperasi di luar Jakarta mereka harus "membonceng" bank-bank pemerintah/swasta. Peranan sepuluh bank ini lebih kurang 10% dari deposito-deposito bank dan perkreditan. Dari jumlah kredit bank-bank swasta nasional sebesar Rp. 775 milyar itu terdapat kredit "boncengan", sehingga perbandingan persentase kelihatan lebih besar untuk bank-bank nasional.

Sepuluh bank asing itu adalah ABN, American Express International, Bangkok Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Chartered Bank, Chase Manhattan Bank, City Bank, European Asian Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bank Perdana, terhitung sebagai bank domestik dengan mayoritas modal Jepang dan merupakan *old timer*.

Peranan bank-bank asing ini telah melancarkan perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Mereka juga merupakan katalisator dalam modernisasi dan pembaharuan manajemen perbankan dalam negeri karena praktek yang luas dan teknik-tekniknya yang berpengalaman. Tetapi karena 'keunggulan' bank-bank asing itu harus dijaga (pengalaman, keahlian, dan kekuatan modal) jangan samapai 'menjepit' bank-bank swasta nasional, maka gerak-gerak mereka dibatasi.

Yang diperbolehkan masuk dengan lebih leluasa adalah perwakilan-perwakilan bank yang kini sudah berjumlah lebih kurang 50. Perwakilan bank tidak terlalu mengkuatirkan karena mereka tidak diperbolehkan aktif dalam transaksi perbankan dalam negeri. Peranan mereka dicitrakan menjaga kepentingan-kepentingan modal asing langganan mereka; atau jika mau ikut serta, mereka dapat aktif sebagai jembatan lembaga keuangan pembangunan. Bidang ini memang belum maju!

LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral tradisional, merupakan alat pendorong pembangunan

Kemudian didirikan beberapa sumber keuangan untuk pengusaha kecil, sesuai dengan rencana pemerataan. Antara lain diciptakan Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen. KIK dimaksudkan untuk membiayai keperluan investasi (maksimum Rp. 10 juta, jangka waktu 5 tahun), sedang KMKP untuk keperluan modal kerja pengusaha-pengusaha kecil bumiputera (maksimum Rp. 10 juta, jangka waktu 3 tahun). Juga didirikan *development finance company* (semacam merchant bank di negara-negara *commonwealth*, termasuk di Singapura). Tiga buah Development Finance Company telah didirikan yakni PT Indonesian Development Finance Corporation, PT Private Development Finance Company of Indonesia, dan PT Bahana. Aktivitas yang terakhir ialah: memberikan kredit kepada industri-industri bumiputera. Sedangkan dua yang pertama adalah joint antara Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah/asing/nasional.

Sembilan buah investment company didirikan yang kebanyakan merupakan usaha bersama pemerintah dengan bank-bank pemerintah/swasta. Dalam rangka ini terdapat sebuah konsorsium bank-bank nasional asing dan Bank Indonesia sebagai pemegang modal terbesar (66%) yakni PT Ficorinvest. Lembaga-lembaga yang disebut di atas mendapat fasilitas-fasilitas dari Bank Indonesia untuk rediscount dan pembiayaan-pembiayaan kembali.

DANAREKSA

PT Danareksa merupakan sebuah perusahaan permodalan pemerintah untuk membeli saham-saham perusahaan besar, dan menjual lagi kepada masyarakat dalam denominasi yang lebih kecil. Dengan adanya PT Danareksa diharapkan akan timbul efek penyebaran yang lebih luas dan merata, dan pemindahan modal ke tangan bumiputera.

PT ASKRINDO

PT Askrindo merupakan perusahaan patungan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam bidang asuransi, terutama yang memberikan jaminan kepada kredit-kredit yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil.

PT PAPAN SEJAHTERA

PT Papan Sejahtera adalah sebuah finance company yang membantu meluluskan pembangunan-pembangunan baru perumahan di Indonesia (dengan modal patungan Bank Indonesia dan merchant bank asing). Perusahaan tersebut diperbolehkan mengeluarkan surat-surat hutang jangka menengah/panjang dan menerima deposito-deposito dari calon pembeli rumah. Selanjutnya kepada developer-developer dapat diberikan pinjaman-pinjaman jangka menengah/panjang.

PERANAN PEMBANGUNAN BANK SENTRAL

Demikianlah Bank Indonesia sebagai bank sentral juga telah mengisi kekosongan-kekosongan dalam bidang pembiayaan untuk pembangunan. Peranan Bank Indonesia dalam mendorong pembangunan sangat banyak, dari mobilisasi dana sampai dengan penyediaan infrastruktur, latihan-latihan, dan sebagainya.